



Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Maret 2025

Halaman: 1

# Ingin Tarik Retribusi Sampah

**YOGYAKARTA, Joglo Jogja** - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mempertimbangkan untuk menarik retribusi sampah dari rumah tangga. Rencana membebaskan retribusi dengan hanya membayar iuran untuk penggerobak sampah mendapatkan penolakan dari wakil rakyat di DPRD Kota Yogyakarta.

"Akan saya sampaikan ke DPR ini. Supaya warga-warga tidak mampu rumahnya hanya 200 meter kurang nggak usahlah ditarik retribusi. Kalau dia membayar hanya membayar gotong royong bersama RW saja. Seperti apa Pak RW mengaturnya," kata Hasto, Kamis (20/3/2025).

Ia menjelaskan, ada beberapa opsi untuk retribusi sampah ini. Salah satunya ada usulan sampah retribusi

berdasarkan berat timbangan. Tapi, hal tersebut tetap tidak akan menyelesaikan. Apalagi, tiap kelurahan itu dari catatannya bisa mencapai lima ton.

"Di antaranya draf di DPR nanti di depo kalau tidak dipilah ditariki Rp 500 ribu. Dipilah Rp 100 ribu. Bagi saya tidak bisa. Bagaimana dimintai, wong mereka itu satu kelurahan lima ton kok. Kalau dimintai sudah dua juta setengah. *Mosok* sehari (membayar Rp 2,5 juta) kan tidak masuk akal," jelasnya.

Hasto menegaskan, dirinya akan berjuang ke DPRD Kota Yogyakarta untuk bisa membebaskan retribusi bagi masyarakat kurang mampu. Terutama, warga yang di rumah tidak memiliki usaha dan luas rumahnya kurang dari 200 meter persegi.

"Saya akan berjuang ke DPR, rumah tangga itu yang tidak berbisnis, kurang dari 200 meter itu akan saya bebaskan dari retribusi," katanya.

Ia mengungkapkan, diskusi mengenai perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 30 Tahun 2023 tentang Retribusi tersebut saat ini masih belum ada titik temu. Ia berharap, dalam waktu dekat pembahasan retribusi sampah ini bisa segera selesai agar persoalan seunguhnyanya yaitu tumpukan sampah di depo serta kesulitan warga mem-



Hasto Wardoyo  
Wali Kota Yogyakarta

buang sampah bisa segera mendapatkan titik temu.

"DPR rembugan tentang retribusi sampah itu agak iniliah. Terlalu berat menurut saya," jelas mantan kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi ini menambahkan, saat ini warga sudah terbebani

dengan iuran untuk penarik sampah. Makanya, dirinya ingin warga tak terbebani lagi soal sampah ini.

"Saya tidak menentukan, bukan lurah, bukan camat. RW bersama

dengan warga yang menyelesaikan itu (iuran sampah)," katanya. Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi Setyawan menegaskan biaya operasional pengelolaan sampah sangat besar. Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Jangan dilihat nilai kecil Rp 3 miliar (retribusi sampah). Tapi, lihat biaya operasional sampah setahun Rp 70,9 miliar untuk tahun 2024. Sangat besar, ini tentunya dengan kondisi keuangan pemerintah saat ini," katanya, Jumat (14/3).

Krisnadi mengungkapkan, dengan operasional pengelolaan sampah setahun lalu mencapai Rp 70,9 miliar seharusnya ada kebijakan bagaimana semakin memaksimalkan

kan potensi retribusi sampah ini.

"Kami menghitung secara kasar saja, jika per kilogram Rp 100, potensi sebenarnya bisa Rp 15 miliar. Hasil retribusi Rp 3 miliar ini kan sebenarnya karena penarikan tidak maksimal," katanya.

Hal senada diungkapkan anggota dewan dari PKS Nurcahyo Nugroho. Dia berharap retribusi tetap dilakukan. Ini sebagai wujud dari edukasi soal pengolahan sampah kepada warga.

Selain tentunya, juga mengenai potensi retribusi. "Kami tidak masalah jika memang mau digratiskan. Asalkan, silahkan mencari sendiri bagaimana pembiayaan operasional sampah ini. Karena pasti akan ada penggeseran anggaran," jelasnya. (eri/amd/wa)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005